



## Kasus Dugaan Pungli Usaha Water Sport Penyidik Telusuri Keterlibatan Bendesa Tanjung Benoa

DENPASAR, NusaBali

Meski menegaskan jika pungutan usaha water sport di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung sudah sesuai Pararem dan Kesepakatan antara Desa Adat Tanjung Benoa dan pengusaha, namun penyidik Subdit I Dit Reskrim Polda Bali terus mengusut dugaan pungli. Salah satunya membidik orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan pungutan tersebut.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky Widjaja mengatakan saat ini penyidik masih terus mendalami keterangan tersangka pungli, Ni Komang Rusikawati dan saksi lainnya terkait dugaan pungli di tempat usaha water sport Tanjung Benoa. "Sekarang masih terus didalami," terangnya pada, Senin (7/8).

Dalam pendalaman ini, penyidik akan mendalami siapa yang menyuruh dan bertanggung jawab dalam pungutan tersebut. Termasuk ke mana saja aliran uang pungutan yang ditarik dari para pengusaha water sport sejak beberapa tahun lalu ini.

"Selain tersangka yang sudah diamankan, kami akan usut siapa yang bertanggung jawab dalam pungutan ini," terangnya.

Kasak-kusuk di kepolisian menyebutkan Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda yang juga merupakan anggota DPRD Badung yang merupakan inisiator dalam pungutan tersebut. Namun sampai saat ini Yonda belum bisa diperiksa karena masih menjalani agenda kerja dengan DPRD Badung.

Kombes Hengky sendiri memastikan akan segera memeriksa Bendesa Tanjung Benoa, I Made Wijaya dalam perkara pungli ini. Sampai saat ini sudah ada sekitar 6 saksi yang diperiksa. "Nanti bendesa Tanjung Benoa akan dipanggil untuk diperiksa. Para pengusaha water sport di Tanjung Benoa juga akan diperiksa," pungkasnya.

Selain dibidik dalam kasus pungli water sport, Yonda sebelumnya sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan reklamasi liar dan pembabatan hutan di Pantai Barat, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Bahkan Yonda sudah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka pelanggaran UU No 5 Tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan UU Kehutanan pasal 82 C, Junto 12 C No. 18 Tahun 2013.

Seperti diketahui sebelumnya anggota Subdit I Dit Reskrim Polda Bali mengamankan Ni Komang Rusikawati, 33. Wanita yang tinggal di Jalan Taman Sari, Gang Rambutan Nomor 10, Tanjung Benoa, Kuta Selatan ini tertangkap tangan melakukan pungli (pungutan liar) di areal parkir tempat wisata Water Sport, Tanjung Benoa, Rabu (2/8) siang. Menariknya, tersangka mengaku setor uang kepada Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya untuk pembangunan di desa adat. Sementara Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda belum bisa dihubungi semalam, handphone-nya dalam kondisi tidak aktif. Yonda dan sejumlah anggota DPRD Badung kabarnya sedang lakukan kunjungan kerja ke luar daerah. **rez, cr64**

Edisi : Selasa 8 Agustus 2019

Hal : 5



## Mobil Dinas DPRD Ditarik Uang Transport DPRD Rp 12 Juta/Bulan

**Mulai APBD Perubahan 2017, anggota DPRD Gianyar juga menerima uang tunjangan perumahan.**

GIANYAR, NusaBali

Jajaran DPRD Gianyar menggunakan 40 mobil dinas. Dari jumlah itu, 37 di antaranya akan segera ditarik. 3 mobil lainnya masih dipakai oleh Ketua DPRD dan 2 wakilnya. Sebagai gantinya, 37

anggota dewan ini akan diberikan tunjangan transportasi dan rumah bernilai puluhan juta rupiah setiap bulan. Khusus uang transport diberikan Rp 12 juta per bulan kepada setiap anggota DPRD.

Ketentuan itu berlaku pasca keluarnya PP Nomor 18/2017 tentang Hak, Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gianyar Ketut Astawa Suyasa, Senin (7/8).

"Mobil dinas akan segera ditarik. Ini untuk menjalankan PP No 18/2017," jelasnya. Suyasa mengatakan, seluruh anggota

DPRD Gianyar sudah setuju menjalankan ketentuan PP No 18/2007, terkait penarikan mobil dinas kalangan DPRD. "Sejumlah anggota dewan sudah mulai menyerahkan mobil dinas. Saya kira ini tidak bisa sekaligus, tentunya bertahap," ucapnya.

Pihaknya pun sudah memasang anggaran biaya transport untuk seluruh anggota dewan yang saat ini mengembalikan mobil dinas itu. "Pada APBD Perubahan 2017, kami pasang Rp 12 juta per bulan untuk biaya transport setiap anggota dewan," ungkapnya.

Tidak hanya biaya transport, mulai APBD Perubahan 2017,

seluruh anggota DPRD Gianyar menerima uang tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Gianyar Rp 39 juta, Wakil Ketua DPRD Gianyar Rp 37 juta, untuk anggota DPRD Rp 35 juta. "Ini baru yang kami pasang di APBD Perubahan 2017. Tapi realisasinya akan diatur oleh Perbup, yang saat ini masih diundangkan sehingga belum beredar. Kami juga menunggu hasil analisa kajian bekerjasama dengan pihak Unud," terangnya.

Astawa menambahkan, meski anggaran belum berjalan, namun penyerahan seluruh mobil dinas anggota DPRD Gianyar di dead

line sampai akhir Agustus 2017. "Selanjutnya seluruh mobil itu akan kami serahkan ke bagian aset Pemkab Gianyar. Nanti disana yang mengatur ke SKPD mana mobil-mobil ini difungsikan," ucapnya.

Penyerahan aset berupa 37 unit mobil ini juga akan diikuti pelimpahan puluhan sopir mobil tersebut. Bahkan Astawa mengaku bulan ini sudah memutus amprah gaji untuk para sopir tersebut. "Nanti sopir ini seharusnya mengikuti dimana mobil ini ditempatkan. Tetapi ini kewenangannya sudah tidak disini lagi," imbuhnya. nvi

Edisi : Selasa, 8 Agustus 2017

Hal : 8